



**LKPJ**  
**BAPPERIDA KAB. SIKKA**  
**TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 dapat disusun dan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Penyusunan laporan ini dibuat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi Bupati Sikka pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini adalah sebagai perwujudan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja dalam menjalankan visi dan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik. semoga apa yang telah diupayakan bersama bermanfaat bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka dan kemajuan Kabupaten Sikka pada umumnya.

Maumere, 16 Januari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka,



**Paulus Hilarius Bangkur, S.PI, M.PI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660628 199703 1 005

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	1
1.3. Data PNS .....	3
1.3.1. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan .....	6
1.3.2. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja .....	6
<b>BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH .....</b>	<b>8</b>
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	8
A. Gambaran Pelaksanaan Urusan Program dan Kegiatan Tahun 2024 .....	8
B. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 .....	11
2.2. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja .....	23
2.3. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan .....	32
2.4. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024 ...	32
2.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten .....	32
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
4.1. Kesimpulan .....	35
4.2. Saran .....	36

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Evaluasi Capaian Kinerja Program dan kegiatan BAPPERIDA Kab. Sikka sesuai perjanjian kinerja Tahun 2024 .....	24
Tabel 2.2.	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024 ....	32
Tabel 2.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan LKPJ merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah dan mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya regulasi tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan program dan kegiatan serta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Sehubungan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka sebagai salah satu perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk tahun 2024.

### **1.2 DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan LKPJ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024.

### 1.3 Data PNS

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada BAPPERIDA Kabupaten Sikka berjumlah 51 (lima puluh satu) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1.1.  
Status Kepegawaian BAPPERIDA  
Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	PNS	18	16	34
2.	PPPK	3	1	4
3.	Honor	9	4	13
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>51</b>

Sumber : Olahan BAPPERIDA Kabupaten Sikka, 2024

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 66,67% pegawai BAPPERIDA Kabupaten Sikka berstatus PNS 7,84% adalah Pegawai PPPK dan 25,49% adalah tenaga honor. Dari 13 tenaga honor tersebut 7 orang honorer yang ditempatkan untuk pelayanan administrasi pada kantor BAPPERIDA Kabupaten Sikka dan 6 orang tenaga honor ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre (SIC). Jika diperhatikan dari komposisi jenis kelamin, sebanyak 62,75% adalah laki-laki dan 43,14% adalah perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan agar dapat berkinerja secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya maka, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Untuk tahun 2024 terdapat sejumlah Aparatur Negeri Sipil BAPPERIDA Kab. Sikka telah mengikuti berbagai Bimtek dan pelatihan yang dilaksanakan secara daring berbagai Lembaga pemerintahan baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat yang diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Klasifikasi ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2.  
Tingkat Pendidikan ASN BAPPERIDA  
Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SMA	3
2.	DIII	2
3.	DIV	1
4.	S1	25
5.	S2	7
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>

Sumber : Olahan BAPPERIDA Kabupaten Sikka, 2024

Dari data tersebut diatas 18.42% ASN BAPPERIDA Kabupaten Sikka adalah berpendidikan Strata Dua (S-2), diikuti 63.16% berpendidikan Strata Satu (S-1), 2.63% berpendidikan Diploma IV, 5.26% berpendidikan Diploma III, dan 7.89% berpendidikan SMA.

Pegawai negeri sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN BAPPERIDA Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.3.  
Jenjang Pangkat/Golongan ASN BAPPERIDA  
Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama/IV e	-
2.	Pembina Utama Madya/IV d	-
3.	Pembina Utama Muda/IV c	-
4.	Pembina Tingkat I/IV b	1
5.	Pembina/IV a	6
6.	Penata Tingkat I/III d	13
7.	Penata/III c	2
8.	Penata Muda Tingkat I/III b	6
9.	Penata Muda/III a	8
10.	Pengatur Tingkat I /II d	-

11.	Pengatur/II c	2
12.	Pengatur Muda Tingkat I/II b	-
13.	Pengatur Muda/II a	-
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>

Sumber : Olahan BAPPERIDA Kabupaten Sikka, 2024

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa 2,63% ASN BAPPERIDA Kabupaten Sikka memiliki Pangkat Pembina Tingkat I/IVb, diikuti 15,79% memiliki pangkat Pembina/IVa, 34,21% memiliki pangkat Penata Tingkat I/IIIId, 5,26% memiliki Pangkat Penata/IIIc, 15,79% memiliki Pangkat Penata Muda Tingkat I/IIIb, 21,05% memiliki Pangkat Penata Muda/IIIa, dan terdapat 5,26% memiliki Pangkat Pengatur/IIc.

Jika digambarkan sebaran ASN pada BAPPERIDA Kabupaten Sikka menurut golongan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	5	1	8
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	7	1	8
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	4	1	5
5	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	4	1	5
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	3	1	4
7	Bidang Riset dan Inovasi	-	-	3	2	5
8	UPT Sikka Inovation Centre (SIC)	-	-	3	-	3
	<b>Jumlah</b>					<b>38</b>

Sumber: Hasil Olahan BAPPERIDA Kabupaten Sikka 2024

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjejang sebagai berikut :

Tabel 1.5.  
ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan  
Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan</b>	<b>Jumlah ASN Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan</b>
1.	PIM II	-	-
2.	PIM III	2	4
3.	PIM IV	11	14
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>19</b>

Sumber : Olahan BAPPERIDA Kabupaten Sikka, 2024

Dari data tersebut diatas sebanyak 2 orang ASN BAPPERIDA Kabupaten Sikka telah mengikuti Diklat PIM III dan 11 orang telah mengikuti Diklat PIM IV, sementara yang belum mengikuti Diklat PIM II sebanyak 1 orang, Diklat PIM III 4 orang dan Diklat PIM IV sebanyak 14 orang.

### 1.3.1. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, menaungi unit usaha produksi dengan nama UPT SIC yang memproduksi coklat sikka dan merupakan salah satu sumber penerimaan PAD bagi Pemerintah Daerah kabupaten sikka. Tahun 2021 dari target pagu sebesar Rp.237.051.750,- dengan Realisasi Pendapatan sebesar Rp.109.826.000,- atau sebesar 46.33%.

### 1.3.2. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Untuk tahun 2021, Bapelitbang Kabupaten Sikka mengelola anggaran sebesar Rp.9.815.287.451,-. Dari rencana belanja daerah sebesar Rp.9.815.287.451,- sampai akhir Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp.8.478.001.125,- atau 86,38%. Realisasi tersebut berasal dari Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dari rencana sebesar Rp.2.894.841.153,- terealisasi Rp.2.750.435.783,- atau 96,49% dan Belanja Barang dan Jasa dari rencana sebesar Rp.6.915.443.898,- terealisasi Rp.5.727.565.342,- atau 58,35% dan Belanja Modal dari rencana sebesar Rp.5.002.400,- terealisasi Rp.0,- atau 0%. Secara lebih rinci, realisasi Belanja Daerah pada tahun 2021 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.10

Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja Tahun 2021

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	
			<b>Rp.</b>	<b>%</b>
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>Rp.9.815.287.451</b>	<b>Rp. 8.478.001.125</b>	<b>86,38</b>
1.	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 9.810.285.051</b>	<b>Rp. 8.478.001.125</b>	<b>86,38</b>

	Belanja Pegawai	Rp. 2.894.841.153	Rp. 2.750.435.783	96,49
	Belanja Barang dan Jasa	Rp.6.915.443.898	Rp.5.727.565.342	58,35
2.	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp.5.002.400</b>	<b>Rp.0</b>	<b>0</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.5.002.400	Rp. 0	0

Sumber : Bapelitbang Kab. Sikka Tahun 2021

## **BAB II**

# **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut. Urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang disebut urusan konkuren serta urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan urusan pilihan dan urusan wajib di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 telah diimplementasikan melalui program dan kegiatan serta target kinerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024.

### **2.1 Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### **A. Gambaran Pelaksanaan Urusan Program dan Kegiatan Tahun 2024**

Perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen perencanaan yang pro publik serta meningkatkan proporsi serapan anggaran yang memihak pada masyarakat. Tahun 2024 Bapperida Kab. Sikka melaksanakan 4 program, 18 kegiatan dan 64 sub kegiatan yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan :
  - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
  - c) Administarasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
    - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - d) Administarasi Umum Perangkat Daerah :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Penyediaan Jasa Penyediaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - Pemeliharaan Mebel;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan dan sub kegiatan :
- a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan :
- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD;
  - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
  - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan;
  - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah :
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten.
- c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah :
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten;
  - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pembangunan Daerah.
- d) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah :
- Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah;

- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan dan sub kegiatan :
- a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:
    - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
    - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
    - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
    - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
    - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
    - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
    - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
  - b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) :
    - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
    - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
    - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
    - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
    - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
    - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA;
    - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA;
    - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
  - c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan :
    - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
    - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
    - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
    - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur;
    - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan, dengan kegiatan dan sub kegiatan :
- a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan :
    - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum;
    - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi;
    - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan;
    - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan.
  - b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Kependudukan :
    - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata;
  - c) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan :
    - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
  - d) Pengembangan Teknologi dan Inovasi :
    - Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;
    - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
    - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif;
    - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

## **B. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024**

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka melaksanakan 2 bidang urusan yaitu Bidang Urusan Perencanaan dan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan. Untuk melaksanakan kedua bidang urusan tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp12.157.528.186,- dengan realisasi sebesar Rp11.090.080.813,- atau sebesar 91,22%. Rincian realisasi menurut masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **Bidang Urusan Perencanaan**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, dilaksanakan dengan 7 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.752.507.608,- terealisasi sebesar Rp4.378.914.248,- atau 92.14%, untuk membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang dialokasikan anggaran sebesar Rp34.037.380,- terealisasi sebesar Rp29.934.070,- atau 87,94%. Kegiatan ini meliputi 3 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.000.000,- terealisasi sebesar Rp6.982.730,- atau 99,75%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Penyusunan Renja Tahun 2025 dan Penyusunan DPA, DPA Mendahului Perubahan serta DPPA Bapperida Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebanyak 4 dokumen.
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.037.380,- terealisasi sebesar Rp15.984.540,- atau 79,77%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Penyusunan Dokumen LKPJ, LAKIP, LPPD, Perjanjian Kinerja dan SAKIP Bapperida Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebanyak 4 dokumen.
  - c) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.000.000,- terealisasi sebesar Rp6.966.800,- atau 99,53%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Penyusunan Laporan Evaluasi Renja triwulan I tahun 2023, Laporan Evaluasi Renja triwulan II-IV, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Monev Internal triwulan I-IV tahun 2024, Laporan Tahunan Bapperida Kab. Sikka Tahun 2024 sebanyak 4 dokumen.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang dialokasikan anggaran sebesar Rp3.484.963.773,- terealisasi sebesar Rp3.204.154.416,- atau 91,94%. Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.647.454.905,- terealisasi sebesar Rp3.103.973.336,- atau 91,76%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan 38 ASN Bapperida Kabupaten Sikka selama tahun 2024, Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk 8 bulan serta Insentif atas pemungutan retibusi jasa usaha penjualan Cho-sik selama Tahun 2024.
  - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp102.172.830,- terealisasi sebesar Rp100.181.080,- atau 98,05%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Administrasi Pengajuan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bapperida Kabupaten Sikka selama Tahun 2024 sebanyak 12 laporan atau sebanyak 260 dokumen.

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.533.980,- terealisasi sebesar Rp7.531.900,- atau 99,97%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian sebanyak 95 dokumen.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.626.190,- terealisasi sebesar Rp290.560.331,- atau 96,65%. Kegiatan ini meliputi 6 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.997.260,- terealisasi sebesar Rp9.544.000,- atau 100%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai penyediaan komponen dan peralatan listrik sebanyak 2 Paket.
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.999.990,- terealisasi sebesar Rp49.655.290,- atau 99,31%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor sebanyak 12 paket.
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.986.830,- terealisasi sebesar Rp6.813.950,- atau 97,53%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai kebutuhan alat penghias ruang kerja (Gorden) sebanyak 1 paket.
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.727.110,- terealisasi sebesar Rp37.328.300,- atau 91,65%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai makan minum rapat, penyelesaian teknis kegiatan dan penyediaan makan minum tamu sebanyak 15 paket.
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,- terealisasi sebesar Rp49.999.800,- atau 100%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai kebutuhan penggandaan, cetak dan penjilidan bahan keperluan kantor sebanyak 12 paket.
  - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp142.915.000,- terealisasi sebesar Rp137.218.991,- atau 96,01%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan koordinasi kedalam dan keluar daerah sebanyak 30 laporan.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp75.664.100,- terealisasi sebesar Rp71.904.420,- atau 95,03%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan

- Lainnya, dengan hasil pengadaan belanja modal 2 unit Laptop, 2 unit printer, 1 unit drone, 4 unit AC, 1 unit LCD proyektor, Microphone dan tiang mik sebanyak 3 unit.
- 6) Kegiatan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp668.191.960,- terealisasi sebesar Rp620.033.836,- atau 92,79%. Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp215.382.690,- terealisasi sebesar Rp169.822.566,- atau 78.85%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai layanan jasa air, listrik, telepon, internet dan Hosting website pada Bapperida Kabupaten Sikka dan UPT Sikka Inovation Centre (SIC) selama 12 bulan.
    - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp452.809.270,- terealisasi sebesar Rp450.211.270,- atau 99,43%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai honorarium pegawai honorer/tidak tetap pada Kantor Bapperida sebanyak 6 orang, pada UPT. SIC sebanyak 7 orang, jasa-jasa asuransi, upah kerja sopir sebanyak 1 orang serta untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih untuk 12 bulan.
  - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp181.490.225,- terealisasi sebesar Rp154.795.275,- atau 85,29%. Kegiatan ini meliputi 6 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.170.640,- terealisasi sebesar Rp91.723.770,- atau 94.39%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai jasa service, pengadaan suku cadang dan bahan bakar/pelumas kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua, pajak kendaraan roda dua 19 Unit dan roda empat 2 Unit.
    - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.335.965,- terealisasi sebesar Rp3.335.965,- atau 100%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan meja kerja dan 1 unit lemari arsip.
    - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.999.440,- terealisasi sebesar Rp1.647.600,- atau 18,31%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan mesin potong rumput dan pembelian suku cadang 1 unit mesin potong rumput.

- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.993.100,- terealisasi sebesar Rp49.500,- atau 0.50%. Anggaran ini rencananya digunakan pemeliharaan Sarana dan Prasarana gedung kantor, namun tidak direalisasikan.
- e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.991.080,- terealisasi sebesar Rp49.988.440,- atau 99.99%. Anggaran ini digunakan untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana gedung kantor, penggantian kusen dan kaca jendela 6 unit ruang kerja, pemeliharaan 1 unit selasar gedung kantor.
- f) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.000.000,- terealisasi sebesar Rp8.050.000,- atau 67.08%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan jasa pemeliharaan AC dan jasa pemeliharaan laptop serta printer untuk mendukung kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

## **2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan 3 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi dana sebesar Rp2.279.669.130,- terealisasi sebesar Rp2.030.025.640,- atau 89.05%, untuk membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.152.195.490,- terealisasi sebesar Rp1.088.237.400,- atau 94,45%. Kegiatan ini meliputi 3 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.149.080,- terealisasi sebesar Rp39.931.600,- atau 99,46% dengan output yang dihasilkan yaitu 1 Berita Acara pelaksanaan koordinasi Forum Perangkat Daerah.
  - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.187.212.540,- realisasi sebesar Rp.182.093.100,- atau 97,27% anggaran ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Nasional, dengan output yang dihasilkan yaitu 1 Berita Acara.
  - c) Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp78.638.500,- terealisasi sebesar Rp74.932.500,- atau 95,29%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai membiayai fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang RKPD di 21

Kecamatan dengan output kegiatan yaitu data Perencanaan desa/kelurahan terinput dalam Aplikasi SIPD sebanyak 582 usulan.

- d) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.829.407.800,- realisasi sebesar Rp.771.540.200,- atau 93.02%. Anggaran ini digunakan untuk Penyusunan Dokumen RPJMD Teknokratik 2025-2029, Dokumen RKPD Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 serta Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.002.760,- terealisasi sebesar Rp79.422.220,- atau 80,22%. Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
    - a) Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.452.080,- realisasi sebesar Rp.15.741.320,- atau 90,20%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Penyusunan Data Sebaran Program/Kegiatan sebanyak 1 Dokumen.
    - b) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.550.680,- realisasi sebesar Rp.63.680.900,- atau 78,09%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai penyusunan dokumen Profil Daerah Kabupaten Sikka sebanyak 1 Dokumen.
  3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp702.290.880,- terealisasi sebesar Rp560.295.220,- atau 79,78%. Kegiatan ini meliputi 2 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
    - a) Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.230.963.680,- realisasi sebesar Rp.146.366.920,- atau 63,37%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai koordinasi penginputan usulan DAK melalui aplikasi KRISNA dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Realisasi Dana TP dan Dekonsentrasi, sebanyak 1 dokumen.
    - b) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.471.327.200,- realisasi sebesar Rp.413.928.300,- atau 87,82%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan penyusunan Dokumen Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2023 dan Dokumen Evaluasi RKPD Triwulan I-III Tahun 2024, Dokumen LKPJ Bupati Sikka Tahun 2023.

4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp326.180.000,- terealisasi sebesar Rp302.070.800,- atau 92,61% kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.326.180.000,- realisasi sebesar Rp.302.070.800,- atau 92,61% dengan output yang dihasilkan yaitu koordinasi pelaksanaan SIPD Terintegrasi.

### **3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan 3 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi dana sebesar Rp1.347.977.680,- terealisasi sebesar Rp1.023.107.283,- atau 75.90%, untuk membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp614.639.970,- terealisasi sebesar Rp454.486.236,- atau 73.94%. Kegiatan ini meliputi 7 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp91.432.180,- terealisasi sebesar Rp75.599.756,- atau 87,06%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang koordinasi, verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kunjungan Kerja Dalam Rangka Penjajakan Kerja Sama Antar Daerah di Sektor Kesehatan, Infrastruktur, Pertanian, Peternakan, Pariwisata, Perikanan dan Pendapatan Daerah, tersusunnya Dokumen TKPKD Tahun 2024, tersusunnya Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2024 sebanyak 11 Dokumen Perangkat Daerah.
  - b) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.905.800,- realisasi sebesar Rp.12.411.400,- atau 65,65%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang koordinasi dan verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebanyak 6 Dokumen Perangkat Daerah.
  - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.106.370,- realisasi sebesar Rp.13.718.400,- atau 71,80%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan koordinasi perangkat daerah bidang koordinasi

dalam penyusunan laporan LKPJ dan Laporan evaluasi RKPD Triwulanan Perangkat daerah sebanyak 13 Dokumen Perangkat Daerah.

- d) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.426.200,- realisasi sebesar Rp.590.100,- atau 1.71%. Anggaran ini rencananya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan harmonisasi dokumen perencanaan.
  - e) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp395.869.930,- terealisasi sebesar Rp330.380.980,- atau 83,46%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang koordinasi, koordinasi penanggulangan stunting, dan Assesment PAUD HI di 34 PAUD dengan output sebanyak 17 Dokumen Perangkat Daerah.
  - f) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.352.890,- realisasi sebesar Rp.11.774.800,- atau 34,28%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan asistensi dan pendampingan penyusunan 12 dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dan Penyusunan rencana aksi konvergensi stunting Daerah.
  - g) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.546.600,- realisasi sebesar Rp.6.010.800,- atau 29,25%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan Perangkat Daerah, Pelaksanaan Aksi Konvergensi stunting tingkat kecamatan dan desa, Penyusunan Laporan LKPJ serta evaluasi renja perangkat daerah sebanyak 26 Dokumen Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp380.536.090,- terealisasi sebesar Rp287.997.087,- atau 75.68%. Kegiatan ini meliputi 8 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp41.845.580,- terealisasi sebesar Rp38.894.000,- atau 92,95%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian sebanyak 19 Dokumen Perangkat Daerah.

- b) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.679.860,- realisasi sebesar Rp.43.842.157,- atau 47,82%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan asistensi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 14 Dokumen Perangkat Daerah.
- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.842.240,- realisasi sebesar Rp.57.689.400,- atau 95,48%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil perencanaan Perangkat Daerah bidang koordinasi dalam penyusunan laporan LKPJ dan Laporan evaluasi RKPD Triwulanan Perangkat daerah sebanyak 29 dokumen.
- d) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp31.994.730,- realisasi sebesar Rp.25.201.470,- atau 78,77%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 14 dokumen laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian.
- e) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.323.460,- terealisasi sebesar Rp32.433.760,- atau 80,43%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai koordinasi penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Koordinasi Bidang SDA Tahun 2025 sebanyak 8 Dokumen.
- f) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.641.710,- realisasi sebesar Rp.21.120.200,- atau 76,41%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan asistensi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 4 Dokumen Perangkat Daerah.
- g) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.812.690,- realisasi sebesar Rp.40.117.800,- atau 69,39%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil perencanaan Perangkat Daerah bidang koordinasi dalam penyusunan laporan LKPJ dan Laporan evaluasi RKPD Triwulanan Perangkat daerah sebanyak 9 dokumen.

- h) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp31.994.730,- realisasi sebesar Rp.25.201.470,- atau 78,77%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 4 dokumen laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA.
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp352.801.620,- terealisasi sebesar Rp280.623.960,- atau 79.54%. Kegiatan ini meliputi 8 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp86.414.730,- terealisasi sebesar Rp73.343.400,- atau 84,87%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025 – 2045, koordinasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025, dan koordinasi penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Infrastruktur Tahun 2025 sebanyak 13 Dokumen.
- b) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.518.160,- realisasi sebesar Rp.11.857.980,- atau 43,09%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan asistensi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur; Kebineamargaan, Perhubungan, SDA dan Lingkungan Hidup serta fasilitasi kegiatan DAK bidang infrastruktur sebanyak 10 Dokumen Perangkat Daerah.
- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.397.820,- realisasi sebesar Rp.44.298.400,- atau 95,48%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil perencanaan Perangkat Daerah bidang koordinasi dan penyusunan laporan LKPJ dan Laporan evaluasi RKPD Triwulanan Perangkat daerah sebanyak 20 Dokumen Perangkat Daerah.
- d) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.916.560,- realisasi sebesar Rp.31.553.900,- atau 87,85%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai koordinasi penyusunan 10 dokumen laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur.

- e) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp43.446.390,- terealisasi sebesar Rp24.731.800,- atau 56,92%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang kewilayahan, dan koordinasi perencanaan penanganan perumahan/Pokja PKP sebanyak 42 Dokumen Perangkat Daerah.
- f) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.532.060,- realisasi sebesar Rp.16.593.700,- atau 84,96%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan asistensi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang kewilayahan dan fasilitasi kegiatan DAK bidang kewilayahan sebanyak 42 Dokumen Perangkat Daerah.
- g) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar 44.896.300,- realisasi sebesar Rp.34.780.900,- atau 77,47%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dalam penyusunan laporan LKPJ dan Laporan evaluasi RKPD Triwulanan Perangkat daerah sebanyak 84 dokumen.
- h) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.679.600,- realisasi sebesar Rp.43.463.880,- atau 89.29%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai koordinasi penyusunan 42 dokumen laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan.

## **Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan**

### **4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dilaksanakan dengan 4 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi dana sebesar Rp3.777.373.768,- terealisasi sebesar Rp3.658.033.642,- atau 96.84%, untuk membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan sub kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp935.916.100,- terealisasi sebesar Rp904.988.929,- atau 96.70%. Kegiatan ini meliputi 8 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp473.695.800,- terealisasi sebesar Rp469.736.414,- atau 99,16% dengan output yang dihasilkan 3 Dokumen yaitu Dokumen Arsitektur SPBE Kabupaten Sikka, Penyusunan kajian strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka, Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sikka.
  - b) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.899.300,- realisasi sebesar Rp.126.612.060,- atau 98,99% dengan output yang dihasilkan 1 Dokumen yaitu Laporan hasil Penyusunan dan Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024.
  - c) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan dengan pagu anggaran sebesar Rp.185.143.500,- realisasi sebesar Rp.170.094.336,- atau 91,87% dengan output yang dihasilkan 1 Laporan yaitu Laporan capaian indikator kinerja.
  - d) Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan dengan pagu anggaran Rp.149.177.500,- realisasi sebesar Rp.138.546.119,- atau 92.87% dengan output yang dihasilkan 1 Laporan yaitu Laporan koordinasi dan pengambilan data penelitian dan perencanaan pembangunan.
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp682.316.100,- terealisasi sebesar Rp667.641.960,- atau 97.85%. Kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp682.316.100,- terealisasi sebesar Rp667.641.960,- atau 97,85% dengan output yang dihasilkan 2 Dokumen yaitu Dokumen rencana induk pariwisata dan Dokumen rencana induk Geopark.
  3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp826.914.600,- terealisasi sebesar Rp800.793.633,- atau 96.84%. Kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp826.914.600,- terealisasi sebesar Rp800.793.633,- atau 96.84% dengan output yang dihasilkan 3 Dokumen yaitu Dokumen EHRA, DED Drainase Perkotaan dan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL).
  4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.332.226.968,- terealisasi sebesar Rp1.284.609.120,- atau 96.43%. Kegiatan ini meliputi 4 sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.144.999.268,- realisasi sebesar Rp.1.120.959.170,- atau 97,90% dengan output yang dihasilkan 4 laporan yaitu Laporan Uji coba Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pakan ternak, Laporan Pendampingan dan pelatihan pengemasan minuman alkohol tradisional, Laporan Pelatihan pengolahan kebun petani hortikultura, Pengembangan aplikasi reporting UKPBJ.
  - b) Sub Kegiatan Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dana penerapan teknologi dengan pagu anggaran sebesar Rp.149.999.900,- realisasi sebesar Rp.147.271.690,- atau 98,18% dengan output yang dihasilkan yaitu 1 Laporan Kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024.
  - c) Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.228.000,- realisasi sebesar Rp.4.144.800,- atau 98,03% dengan output yang dihasilkan yaitu 1 laporan Identifikasi Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2024, Innovation Government Awards (IGA) Tahun 2024 Oleh Kementerian Dalam Negeri dan Sosialisasi Replikasi Inovasi.
5. Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan pagu anggaran sebesar Rp.32.999.800,- realisasi sebesar Rp.12.233.460,- atau 37,07% dengan output yang dihasilkan yaitu 1 laporan Koordinasi Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis.

## **2.2 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka dengan Bupati Sikka.

Gambaran analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Sikka Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Capaian Kinerja Program dan kegiatan BAPPERIDA Kab. Sikka sesuai perjanjian kinerja Tahun 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<i>Meningkatnya Kualitas Perencanaan</i>	1. Indeks Kualitas Perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%					383,774,700	524,980,180	547,326,996	823,587,254	57,378,700	680,005,140	300,148,000	992,493,800	Hilarius Rangga Mesa, S.Si
	2. Persentase Ketersediaan Data sesuai Permendagri 86/2017	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	100%					208,362,200	288,055,400	189,336,890	466,441,000	15,077,700	431,182,300	52,312,500	589,664,900	Paskalia Carmelita Monasare, SE
	3. Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dan Kesesuaian antar Bab : 70%	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				9,586,250	30,350,000	112,830	100,000	9,341,600	200,000	30,350,000	40,000	Saverinus Keupung, SE
	4. Persentase Kegiatan Perencanaan yang sesuai dengan Tahapan dan Waktu (Evaluasi Kebijakan)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara				25,129,880	151,251,600	10,831,060	-	2,325,000	162,780,200	11,548,000	5,439,900	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	586 usulan	586 usulan				94,766,070	-	660,000	-	-	93,576,100	1,096,400	-	
5. Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		78,880,000	106,453,800	177,733,000	466,341,000	3,411,100	174,626,000	9,318,100	584,185,000		
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan	4 Dok					875,000	35,746,860	33,023,260	29,357,640	1,750,000	399,920	34,471,400	42,800,900	Alfred Zedekias, SE	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		-	13,816,860	3,635,220	-	875,000	399,920	12,541,400.00	1,925,000		
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku		1 Buku			875,000	21,930,000	29,388,040	29,357,640	875,000	-	21,930,000.00	40,875,900		
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Laporan					113,427,500	109,167,920	226,516,846	253,178,614	40,551,000	132,422,920	156,826,500	230,494,800	Paskalia Carmelita Monasare, SE	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		-	9,817,920	121,070,180	100,075,580	-	9,817,920	53,643,000.00	82,906,000		
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	113,427,500	99,350,000	105,446,666	153,103,034	40,551,000	122,605,000	103,183,500.00	147,588,800		
	Kegiatan Impelementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Impelementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%					61,110,000	92,010,000	98,450,000	74,610,000	-	116,000,000	56,537,600	129,533,200	Saverinus Keupung, SE	
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	61,110,000	92,010,000	98,450,000	74,610,000	-	116,000,000	56,537,600.00	129,533,200		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNG AGIAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%					157,299,790	398,867,776	370,225,322	421,584,792	63,183,200	175,246,850	240,024,966	544,652,267	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%					62,212,500	190,348,476	188,932,516	173,146,478	20,787,000	55,801,420	154,151,406	223,746,410	Drs. Hironimus Laja
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	3 Dok	4 Dok	4 Dok		16,535,000	29,112,626	24,670,254	21,114,300	10,197,000	19,524,000	24,992,626.00	24,886,130	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6 Laporan	3 Lap		3 Lap		-	4,026,000	5,824,240	9,055,560	-	4,026,000	-	8,385,400	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	3 Lap	4 Lap	3 Lap	3 Lap	-	9,400,000	7,306,370	2,400,000	3,400,000	-	-	10,318,400	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Pemerintahan	6 Laporan	3 Lap		3 Lap		-	-	16,386,200	18,040,000	-	-	-	590,100	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17 Dokumen	6 Dok	2 Dok	8 Dok	1 Dok	45,677,500	147,809,850	90,599,595	111,782,985	7,190,000	32,251,420	124,250,780.00	166,688,780	1. Charolus Luanga Saka, S.IP, M.Tr.IP 2. Maria Mei Ika Yuplina, S.STP, M.Ec. Dev
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	6 Lap		6 Lap		-	-	31,528,757	2,824,133	-	-	4,908,000.00	6,866,800	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26 Laporan	6 Lap		6 Lap		-	-	12,617,100	7,929,500	-	-	-	6,010,800	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNG AGJAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%					62,895,690	115,228,400	54,880,780	147,531,220	23,663,600	63,429,090	47,744,000	153,160,397	Yeremias Dewa,S.Pt,M P
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19 Dokumen	7 Dok	2 Dok	10 Dok		10,541,600	10,270,000	6,449,640	14,584,340	15,571,600	3,654,000	4,974,000.00	14,694,400	1. Maria Felixia Octaviany, ST 2. Ignatius Bin Los, SE
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14 Laporan	7 Lap		7 Lap		16,600,000	19,904,660	14,614,000	40,561,200	-	10,887,660	14,872,000.00	18,082,497	1. Maria Felixia Octaviany, ST 2. Ignatius Bin Los, SE
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29 Laporan	7 Lap	7 Lap	8 Lap	7 Lap	17,500,000	18,994,400	8,630,000	13,717,840	3,400,000	20,220,000	6,560,000.00	27,509,400	1. Maria Felixia Octaviany, ST 2. Ignatius Bin Los, SE
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	14 Laporan		7 Lap		7 Lap	8,754,090	11,395,580	4,916,200	6,928,860	-	2,249,670	21,338,000.00	1,613,800	1. Maria Felixia Octaviany, ST 2. Ignatius Bin Los, SE
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	2 Dok	2 Dok	4 Dok		2,250,000	14,391,060	5,500,940	18,181,460	2,442,000	14,073,060	-	15,918,700	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	2 Lap	2 Lap			2,250,000	4,500,000	2,950,000	17,941,710	2,250,000	4,464,000	-	14,406,200	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	9 Laporan	2 Lap	2 Lap	3 Lap	2 Lap	-	21,480,000	5,000,000	31,332,690	-	-	-	40,117,800	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	2 Lap		2 Lap		5,000,000	14,292,700	6,820,000	4,283,120	-	7,880,700	-	20,817,600	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNG AGIAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%					32,191,600	93,290,900	126,412,026	100,907,094	18,732,600	56,016,340	38,129,560	167,745,460	Theresia Maria Da Renya Sabeweo, ST, MT
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	13 Dokumen	5 Dok	2 Dok	6 Dok		16,245,600	19,924,000	22,209,730	28,035,400	7,558,600	19,704,000	6,948,000.00	39,132,800	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10 Laporan	5 Lap		5 Lap		660,000	2,640,000	14,878,780	9,339,380	660,000	2,640,000	-	8,557,980	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	4,760,000	7,140,000	19,205,520	15,292,300	-	4,760,000	7,140,000.00	32,398,400	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10 Laporan	5 Lap		5 Lap		-	10,431,020	12,589,760	12,895,780	-	10,431,020	-	21,122,880	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	42 Dokumen	21 Dok		21 Dok		7,806,000	5,163,000	20,947,681	9,529,709	7,794,000	5,173,000	-	11,764,800	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	42 Laporan	21 Lap		21 Lap		-	6,648,600	6,415,460	6,468,000	-	-	-	16,593,700	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	84 Laporan	21 Lap	21 Lap	21 Lap	21 Lap	2,720,000	15,440,000	17,596,845	9,139,455	2,720,000	2,720,000	12,720,000.00	16,620,900	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	42 Laporan	21 Lap		21 Lap		-	25,904,280	12,568,250	10,207,070	-	10,588,320	11,321,560.00	21,554,000	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNG AGIAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)
Meningkatnya kualitas kelibngan untuk mendukung kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelibngan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%					256,534,538	1,040,950,721	463,569,198	2,016,319,311	31,804,532	205,975,448	532,800,340	2,887,453,322	Fransiskus S. Narabata, ST,M.Sc
	Indeks Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelibngan yang direkomendasikan	100%					61,001,806	234,545,090	255,351,050	385,018,154	25,514,532	66,134,103	129,453,080	683,887,214	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan				2 Lap	21,779,700	112,268,000	190,087,860	149,560,240	2,818,000	1,237,700	89,412,000.00	376,268,714	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan				2 Lap	11,395,270	44,108,690	22,285,290	50,110,050	-	22,706,280	21,517,680.00	82,388,100	
		Pengelolaan Data Kelibngan dan Peraturan	Jumlah Data Kelibngan yang dikelola dengan baik	1 Laporan				1 Lap	24,168,836	14,820,000	34,611,900	111,542,764	950,000	25,018,836	-	144,125,500	
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan				2 Lap	3,658,000	63,348,400	8,366,000	73,805,100	21,746,532	17,171,287	18,523,400.00	81,104,900	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Implementasi Rencana Kelibngan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%					75,000,000	182,980,000	1,854,300	422,481,800	-	4,980,000	-	662,661,960	
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	2 Dokumen				2 Dok	75,000,000	182,980,000	1,854,300	422,481,800	-	4,980,000	-	662,661,960	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Impelementasi Rencana Kelibngan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%					3,810,000	400,081,805	74,857,928	348,164,867	-	59,719,185	206,476,620	534,597,828	
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 Dokumen				3 Dok	3,810,000	400,081,805	74,857,928	348,164,867	-	59,719,185	206,476,620.00	534,597,828	
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	0 Dokumen					-	-	-	-	-	-	-	-	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNG AGIAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100%					116,722,732	223,343,826	131,505,920	860,654,490	6,290,000	75,142,160	196,870,640	1,006,306,320	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen				5 Dok	108,289,572	197,093,126	85,699,380	753,917,190	3,570,000	60,979,500	192,620,640.00	863,789,030	
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan				1 Lap	7,929,160	22,608,700	44,724,540	74,737,500	2,720,000	10,017,860	4,250,000.00	130,283,830	
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan				1 Lap	504,000	3,642,000	82,000	-	-	4,144,800	-	-	
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan				1 Lap	-	-	1,000,000	31,999,800	-	-	-	12,233,460	
<b>Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Indeks kualitas sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>					<b>1,138,495,962</b>	<b>1,349,579,951</b>	<b>1,145,251,944</b>	<b>1,119,179,751</b>	<b>535,373,321</b>	<b>1,821,062,698</b>	<b>765,535,772</b>	<b>1,256,942,457</b>	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok					7,395,710	5,240,000	6,256,000	15,145,670	2,335,000	4,391,710	4,520,000	18,687,360	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1,613,850	540,000	-	4,846,150	935,000	784,250	-	5,263,480	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	4 Lap				5,131,860	4,250,000	5,406,000	5,249,520	1,400,000	3,087,460	4,520,000.00	6,977,080	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	650,000	450,000	850,000	5,050,000	-	520,000	-	6,446,800	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNG AGIAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%					923,024,563	1,020,400,762	870,948,347	670,590,101	427,438,827	1,541,673,893	503,317,056	731,724,640	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Org	38 Org	38 Org	38 Org	38 Org	898,288,983	995,629,262	847,955,907	640,916,791	420,469,827	1,509,961,813	485,113,056.00	688,428,640	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260 Dok	59 Dok	74 Dok	91 Dok	59 Dok	24,735,580	24,771,500	22,992,440	29,673,310	6,969,000	31,712,080	18,204,000.00	43,296,000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan	100%					1,550,000	2,742,000	1,150,000	2,091,980	270,000	3,648,700	-	3,613,200	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	130 Dok	33 Dok	43 Dok	40 Dok	14 Dok	1,550,000	2,742,000	1,150,000	2,091,980	270,000	3,648,700	-	3,613,200	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%					33,101,567	80,510,851	68,099,297	118,914,475	14,902,800	50,685,510	78,417,180	146,554,841	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor yang disediakan	2 Paket			1 Paket	1 Paket	40,000	2,992,000	-	6,965,260	40,000	500,000	2,492,000.00	6,512,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	12,389,517	12,389,511	12,412,771	12,808,191	997,000	17,792,290	11,531,600.00	19,334,400	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket				1 Paket	-	-	-	6,986,830	-	-	-	6,813,950	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket			7 Paket	8 Paket	-	5,113,090	11,044,910	24,569,110	-	-	8,688,000.00	28,640,300	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	5,655,800	25,000,000	-	19,344,200	5,655,800	-	25,000,000.00	19,344,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	15 Laporan	15,016,250	35,016,250	44,641,616	48,240,884	8,210,000	32,393,220	30,705,580.00	65,910,191	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%					-	26,601,500	-	49,062,600	-	251,500	26,350,000	45,302,920	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	13 Unit		3 Unit	1 Unit	9 Unit	-	26,601,500	-	49,062,600	-	251,500	26,350,000.00	45,302,920	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	HASIL YANG AKAN DICAPAI				ANGGARAN (Rp)				REALISASI (Rp)				PENANGGUNG AGIAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%					163,372,874	190,385,080	155,314,292	159,119,714	88,291,546	198,265,977	143,041,086	190,435,227	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	45,883,903	72,117,076	45,338,261	52,043,450	18,097,706	60,858,297	31,203,416.00	59,663,147	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	117,488,971	118,268,004	109,976,031	107,076,264	70,193,840	137,407,680	111,837,670.00	130,772,080	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%					10,051,248	23,699,758	43,484,008	104,255,211	2,135,148	22,145,408	9,890,450	120,624,269	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit		3 unit		10 unit	6,901,148	16,519,758	30,278,773	43,470,961	2,135,148	18,365,308	2,920,450.00	68,302,864	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit				1 unit	-	-	1,582,175	1,753,790	-	-	-	3,335,965	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 unit			750,100	30,000	4,001,510	4,217,830	-	780,100	-	867,500	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit					-	-	4,996,550	4,996,550	-	-	-	49,500	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	7 Unit				7 unit	-	3,550,000	-	46,441,080	-	50,000	3,500,000.00	46,438,440	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	20 Unit		3 Unit	13 Unit	6 Unit	2,400,000	3,600,000	2,625,000	3,375,000	-	2,950,000	3,470,000.00	1,630,000	

## 2.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

1. Penyusunan Dokumen RPJMD Teknokratik Kabupaten Sikka Tahun 2025-2030

## 2.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024

Rekomendasi DPRD Kabupaten Sikka terhadap pelaksanaan kegiatan pada Bapperida Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pemerintah Perlu Segera berkoordinasi dengan OPD terkait dalam mempersiapkan proses penyusunan RPJPD Kab. Sikka Tahun 2025-2045	Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Sikka tahun 2025-2045	Dokumen RPJPD Kabupaten Sikka tahun 2025-2045 sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Kab. Sikka Jangka waktu 25 Tahun

Sumber : Bapperida Kab. Sikka, 2024

## 2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tahun Anggaran 2024

Capaian kinerja BAPPERIDA Kabupaten Sikka 2024 dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Indikator Kinerja Utama BAPPERIDA Kabupaten Sikka Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja Kepala BAPPERIDA Kabupaten Sikka dengan Bupati Sikka.

Pengukuran capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka untuk tahun 2024 mengacu pada 2 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja utama. Pengukuran capaian kinerja ini bertujuan menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan program yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BAPPERIDA Kabupaten Sikka dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tahun 2024-2026. Adapun sasaran, indikator dan capaian kinerja BAPPERIDA Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat diuraikan dalam Tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**BAPPERIDA Kabupaten Sikka Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	<b>Tujuan</b> : Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	Jumlah Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan ----- x 100% Total Penelitian Tahun N	Persen	80	70	72.73	103.90
		Indeks Inovasi Daerah	$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$	Nilai	70	60.10	34.73	57.79
		Indeks Pengelola Keuangan Daerah (IPKD)	Keputusan Gubernur	Nilai	80	65	78.02	120
	<b>Sasaran</b> : Meningkatnya Jumlah Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Penelitian	Jumlah Penelitian tahun N	Angka	4	4	11	275
		Jumlah Inovasi	Jumlah Inovasi tahun N	Angka	28	24	7	29.17
2.	<b>Tujuan</b> : Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai	B	B	B	B
	<b>Sasaran</b> : Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Kajian	Nilai	100	100	92.42	92.42
		Persentase Ketersediaan Data sesuai Permendagri 86/2017	$\frac{\text{Jumlah Data}}{\text{Jumlah data yang sesuai Permendagri 86/2017}} \times 100$	persen	100	100	80	80
		Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dan Kesesuaian antar Bab : 70%	Hasil Evaluasi RKPDP Tahun N	persen	100	100	96.85	96.85
		Persentase Kegiatan Perencanaan yang sesuai dengan Tahapan dan Waktu (Evaluasi kebijakan)	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas}}{\text{Jml. Perangkat Daerah}} \times 100$	persen	100	100	100	100
		Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah program dengan capaian realisasi 'sangat baik'}}{\text{Total program}} \times 100$	persen	100	100	100	100

Sumber : Bapperida Kab.Sikka 2024

### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dan Penugasan lainnya.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pelayanan dan kinerja anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 berisikan informasi-informasi pengelolaan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka.

Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

a. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah yaitu 72.73%, Indeks Inovasi Daerah yaitu 34.73, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yaitu 78.02, Jumlah Penelitian yaitu 11 kajian, Jumlah Inovasi sebanyak 7 inovasi, Indeks Kualitas perencanaan yaitu 92.42, Persentase ketersediaan data sesuai Permendagri 86/2017 yaitu 80, Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dan kesesuaian antar bab : 70% yaitu 96.85, Persentase kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tahapan dan waktu (Evaluasi Kebijakan) yaitu 100, Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yaitu 100, secara keseluruhan dapat disimpulkan sudah cukup baik dan diharapkan dapat ditingkatkan sehingga bisa mencapai hasil yang optimal pada tahun-tahun yang akan datang.

#### b. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024 alokasi anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk pencapaian sasaran adalah sebesar Rp12.157.528.186,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.090.080.813,- atau sebesar 91,22%. Dari persandingan antara persentase realisasi anggaran dengan persentase pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Sikka Tahun 2024 sudah cukup efisien.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Sikka Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Sikka sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

#### **4.2 Saran**

Evaluasi atas capaian hasil penyelenggaraan pemerintahan khususnya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Sikka, merupakan komitmen moral terhadap perbaikan kinerja yang dicapai. Hal ini menjadi landasan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sikka ke depan. Untuk itu marilah bersama-sama satukan kekuatan, rajut kebersamaan dan ciptakan kerjasama yang profesional.

Untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah, melalui (1) peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencana; (2) peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan; dan (3) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan menekankan efisiensi anggaran dan efektifitas pencapaian tujuan.
3. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intens, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan berbagai sektor.